

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekerja migran menjadi salah satu pilihan yang diambil oleh sebagian masyarakat dunia dengan harapan dapat meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik. Hal ini timbul sebagai respon atas ketidakpuasan dengan kehidupan yang ada di negaranya. Keadaan negara asal yang biasanya merupakan negara berkembang dinilai kurang mampu memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah pekerja migran yang besar dan tersebar di berbagai negara yang menjadikannya negara nomor dua pengekspor pekerja migran di dunia dengan penghitungan sekitar 70% pekerja migran Indonesia bekerja pada kategori pekerjaan 3D (*Dirty, Dangerous, Degrading*) karena mereka rata-rata tidak memiliki keahlian khusus akibat latar belakang pendidikan yang rendah (Migrant Care, 2016). Sebagian besar pekerja didominasi oleh wanita yang bekerja sebagai asisten rumah tangga serta buruh di perusahaan. Sedangkan tenaga kerja pria bekerja sebagai buruh perkebunan, konstruksi, transportasi serta jasa.

Berdasarkan data dari *Global Slavery Index* tahun 2018 menemukan bahwa ada 40,3 juta orang yang hidup dalam perbudakan modern dengan rincian 71% perempuan dan 29% laki-laki. Indonesia termasuk ke dalam 10 negara dengan jumlah perbudakan modern terbesar bersama dengan India, China, Pakistan, Korea Utara, Nigeria, Iran, Republik Demokratik Kongo, Rusia, dan Filipina yang mewakili 60% masyarakat yang hidup dalam perbudakan modern dan lebih dari setengah populasi dunia. Sementara negara-negara dengan tingkat kerentanan perbudakan modern dengan peringkat secara berurutan adalah Republik Afrika Tengah, Sudan Selatan, Afghanistan, Suriah, Republik Demokratik Kongo, Somalia, Sudan, Yemen, Irak dan Chad. Sementara berdasarkan prevalensi negara dengan perbudakan modern dalam regional Asia dan Pasifik yang diurutkan berdasar tingkat tertinggi ke terendah,

Indonesia menempati urutan ke-17 dengan perkiraan prevalensi korban per 1.000 populasi mencapai angka 4.7. Angka tersebut berada diatas Vietnam dengan angka 4.5 dan dibawah Nepal dengan angka 6.0 (Walk Free Foundation, 2018).

Dengan minimnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat Indonesia terhadap sistem pekerja migran membuat sebagian besar diantaranya bekerja seperti budak di luar negeri tanpa mengetahui adanya hak-hak yang dapat diperoleh dari status pekerjaannya. Sebagian besar masyarakat hanya fokus bekerja tanpa adanya perlindungan hukum yang membuat kerap terjadinya pelecehan dan penyiksaan di lingkungan kerja. Terlebih, berdasarkan penelitian *Global Slavery Index* diatas juga dapat ditemukan bahwa pekerja migran perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Sayangnya fenomena ini pun tidak diiringi dengan kesiapsiagaan akan segala kemungkinan terburuk seperti diskriminasi dan kekerasan baik dari pihak pemerintah maupun para pekerja migran itu sendiri. Keprihatinan terhadap hak pekerja migran ini semakin muncul sebab hal tersebut seringkali diabaikan dalam lingkungan kerja. Padahal meskipun agensi ataupun pihak terkait yang telah melakukan pengiriman tenaga kerja migran ke luar negeri telah mengikuti aturan hukum yang berlaku, terkadang yang menjadi masalah adalah pemilihan penempatan pekerja yang kurang sesuai dan tidak terpilah dengan baik.

Seiring dengan perkembangan *Non-Governmental Organization* (NGO) di Indonesia yang tidak lepas dari dampak pembangunan sejak era Orde Baru terlebih dengan adanya peningkatan proses marginalisasi mayoritas masyarakat telah membuat peran NGO menjadi berkembang pesat mulai dari sifat primordial yang mengalami proses intelektualisasi menjadi sosio-kultural dengan berfokus pada gerakan politik, hingga mempertajam identitasnya menjadi pemberdayaan masyarakat *vis a vis* negara yang membuat orientasi NGO bertransformasi dari dimensi kesejahteraan menjadi pemberdayaan yang bersifat politis yaitu demokrasi partisipatoris (Cholisin, 2015). Hal ini membuat peran NGO di Indonesia menjadi lebih aktif

dan dinamis. Partisipasi NGO dewasa ini juga telah memberikan andilnya pada persoalan politik, bukan menjadi bagian dari organisasi politik.

Berangkat dari hal tersebut, *Migrant CARE* pun memberikan perhatian khusus dengan mengadvokasi ratifikasi Konvensi Migran 1990 di Indonesia sebagai batu loncatan bagi penjaminan hak-hak pekerja migran dan keluarganya. *Migrant CARE* merupakan satu-satunya NGOs di Asia yang menjadi anggota International NGO Platform on Migrant Workers Convention (IPMWC) (Feyter, 2005). *Migrant CARE* adalah NGO pemerhati pekerja migran yang memiliki tujuan untuk memperkuat perlindungan hak-hak bagi para pekerja migran. *Migrant CARE* telah didirikan pada tahun 2004 oleh Wahyu Susilo, Anis Hidayah dan Mulyadi (Migrant Care, 2016). Sebagai anggota IPMWC, *Migrant CARE* aktif memonitoring pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh komite konvensi migran 1990. Selain itu *Migrant CARE* juga banyak membuat aksi kampanye, menggelar dialog, diskusi bersama-sama dengan pemerhati hak pekerja migran di Indonesia. Seiring dengan keberhasilan ratifikasi Konvensi Migran 1990 di Indonesia, muncul suatu program bernama Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) yang telah diluncurkan pada tahun 2012.

Dinamika politik di Australia telah menunjukkan adanya perbedaan besar dalam pendekatan politik yang dilakukan oleh Partai Buruh Australia dan Koalisi Konservatif antara Partai Nasional dan Liberal di Australia. Kemenangan partai koalisi yang terjadi sejak tahun 2013 telah memberi dampak pada arah politik Australia setelah sebelumnya dimenangkan oleh Partai Buruh Australia pada tahun 2010 dibawah pimpinan Julia Gillard (Financial, 2019). Pergerakan politik konservatif yang dilakukan oleh Australia menunjukkan adanya gerakan *hard policy* dengan menerapkan kebijakan yang mengesampingkan aspek HAM dan semakin restriktif terutama perihal kedatangan pengungsi dan pencari suaka ke Australia. Meskipun terjadi dilema politik di Australia, Australia sebagai salah satu negara yang secara geografis

berdekatan dengan negara-negara Asia Tenggara telah menjadi salah satu mitra dialog ASEAN yang memiliki beberapa bentuk kerja sama dengan beberapa negara di wilayah tersebut.

Program MAMPU merupakan salah satu bentuk kerjasama Pemerintah Indonesia sebagai negara anggota ASEAN dan Pemerintah Australia. Program MAMPU sendiri bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin Indonesia terhadap layanan penting dan program pemerintah (MAMPU, 2018). MAMPU berupaya untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam hal pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) melalui pembangunan kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan sebagai cara dalam memperoleh peningkatan akses terhadap layanan dasar dan program pemerintah. MAMPU telah bekerjasama dengan 13 organisasi serta lebih dari 100 mitra lokal berjejaring. Kemitraan yang ada ini membuat MAMPU memberikan dukungan bagi 32.000 perempuan yang terorganisasi dalam 1.300 kelompok di tingkat desa sebagai upaya kolektif dalam mempengaruhi decision making process dari skala desa hingga parlemen negara. Pada tahun 2018, MAMPU telah melaksanakan kegiatan di 945 desa, di 151 kabupaten / kota di 27 provinsi di seluruh Indonesia (MAMPU, 2020).

Pemerintah Australia melalui program AusAID berperan dalam menyalurkan dana investasi salah satunya pada program MAMPU yang ada di Indonesia. AusAID telah menjadi sumber dana investor untuk Program MAMPU yang tentu menjadi dana operasional bagi mitranya. Tujuan dari kerjasama ini adalah agar dapat meminimalisir banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia khususnya dalam hal permasalahan perempuan. Terdapat 5 wilayah tematik yang dibawa oleh AusAID yaitu; Memperbaiki akses terhadap program Perlindungan Sosial Pemerintah Indonesia, Meningkatkan akses perempuan terhadap pekerjaan dan menghapus diskriminasi di tempat kerja, Memperbaiki kondisi pekerja migran perempuan di luar negeri, Memperkokoh kepemimpinan perempuan dalam kesehatan reproduksi yang lebih baik, Memperkokoh kepemimpinan perempuan untuk mengurangi kekerasan terhadap

perempuan (Hardiana, 2018). Sebagai penyuplai dana operasional, Australia menunjuk Migrant CARE sebagai mitra MAMPU.

Pemerintah Indonesia melalui *Migrant CARE* bersama dengan Australia berupaya untuk memperluas jaringan dan advokasi di tingkat nasional hingga tingkat desa untuk melindungi pekerja migran Indonesia. Dalam praktiknya sebagai mitra MAMPU, Migrant Care memiliki program untuk memperluas jaringan dan advokasi mulai dari tingkat nasional hingga skala kecil seperti desa sebagai langkah melindungi pekerja migran Indonesia. Selain itu, Migrant Care juga berhasil membentuk kelompok pekerja migran dan mengembangkan inisiatif Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) di 5 provinsi meliputi NTB, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat 8 Kabupaten 36 desa sebagai penyedia layanan di tingkat desa bagi pekerja migran ke sebelum, pada saat, dan setelah migrasi (Migrant Care, 2019).

Maka dari itu, skripsi ini akan berfokus pada kolaborasi Migrant CARE dan Australia dalam mengadvokasi buruh migran di Indonesia melalui program MAMPU dan menganalisis strategi-strategi yang diterapkan dalam menjalankan program tersebut.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana strategi Migrant CARE dan Australia dalam mendorong advokasi buruh migran di Indonesia melalui Program MAMPU?

C. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model *Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics* yang ditulis oleh Margaret Keck dan Kathryn Sikkink.

Transnational Advocacy Networks

Menurut Keck dan Sikkink, *Transnational Advocacy Networks* merupakan jejaring aktivis yang melibatkan dua atau lebih aktor yang bekerja pada tingkat internasional dan terikat oleh nilai-nilai untuk tujuan bersama yang disosialisasikan melalui pertukaran informasi dan

jasa. Selain mempromosikan nilai-nilai bersama, jaringan tersebut juga berperan sebagai kelompok penekan (*pressure group*) untuk mengadopsi kebijakan dan mengawasi kepatuhan yang mengacu pada standar regional dan internasional dalam memperjuangkan dan memberdayakan kelompok-kelompok yang termarginalkan. Konsep *Transnational Advocacy Networks* juga memiliki keunikan tersendiri karena secara teknis para aktor yang terlibat telah terorganisir untuk mempromosikan suatu fenomena, norma-norma, serta sering kali melibatkan individu untuk turut mengadvokasi perubahan kebijakan. Sasaran dari *Transnational Advocacy Networks* secara umum adalah pemerintah yang merupakan aktor pembuat kebijakan di sebuah negara (Keck & Sikkink, 1998).

Transnational Advocacy Networks menjadi semakin penting karena memiliki keunikan dari cara mereka dalam melakukan advokasi sebab dalam praktik kampanyenya, mereka membawa latar belakang khusus, seperti membawa isu tentang kematian pekerja migran, kerusakan lingkungan dan sebagainya. Ketika proses pembuatan keputusan yang hanya bisa diakses oleh suatu negara yang dalam hal ini adalah pemerintah, kelompok-kelompok advokasi berusaha untuk membuka akses dan menuntut andil di dalam cakupan tersebut dengan membawa suara serta kepentingan masyarakat yang kurang teradvokasi dengan baik. Dengan kata lain, *Transnational Advocacy Networks* berusaha mengangkat isu dari masyarakat agar isu tersebut dapat didengar dan diperhatikan.

Menurut konsep *Transnational Advocacy Networks*, terdapat tujuh aktor utama yang mampu memberikan kontribusinya, yaitu meliputi; NGO's (*Non-Governmental Organizations*) baik berupa INGO's (*International Non-Governmental Organizations*) maupun yang berskala nasional, *Local social movements* atau gerakan sosial lokal, Yayasan, Media, Organisasi keagamaan, serikat perdagangan dan para kelompok peneliti intelektual, Bagian dari organisasi regional dan inter-governmental, lembaga eksklusif ataupun parlemen dari suatu pemerintahan.

Ketika salah satu aktor *Transnational Advocacy Networks* telah berada dalam suatu jaringan yang memiliki sebuah visi dengan melakukan strategi politik untuk menghadapi suatu permasalahan tertentu, maka permasalahan yang diajukan tersebut berpotensi untuk menimbulkan reaksi di dalam jaringannya. Hal ini tampak ketika misalnya sebuah NGO melakukan advokasi terhadap suatu negara akan tetapi sayangnya mereka dihadapkan pada rintangan dari pemerintah negara tersebut. Dalam situasi sulit tersebut, banyak NGO serta jejaring advokasi yang ada seringkali menyatakan bahwa mereka mengklaim memperjuangkan hak-hak tertentu yang mampu mengundang interaksi dari pihak lainnya untuk setidaknya memperhatikan fenomena apa yang diangkat. Asumsi yang dibangun seringkali membuktikan bahwa pemerintah suatu negara bukan hanya menjadi penjamin utama terhadap suatu hak, tetapi juga merupakan pelanggar utama atas hak-hak tersebut. Apabila pemerintah negara yang bersangkutan menolak untuk mengakui pelanggaran hak tersebut, kelompok-kelompok NGO yang ada seringkali memiliki rintangan untuk masuk ke dalam arena politik domestik negara yang bersangkutan.

Dalam praktiknya, untuk membentuk konsep *Transnational Advocacy Networks* tidak harus melibatkan semua aktor tersebut. Jadi hanya melalui beberapa aktor saja jaringan tersebut sudah dapat terbentuk dan dapat dijalankan. Umumnya aktor yang memiliki peran paling penting adalah pemerintah, pelaku aktivitis NGO's serta *local social movements*. Meskipun begitu, aktor-aktor *Transnational Advocacy Networks* sering kali memiliki gangguan untuk masuk ke dalam arena politik domestik dalam sebuah negara. Oleh sebab itu, mereka memanfaatkan koneksi dari jaringan internasional untuk membantu permasalahan ini sehingga terbentuk pola hubungan yang disebut sebagai "*Boomerang Pattern*" oleh Keck dan Sikkink.

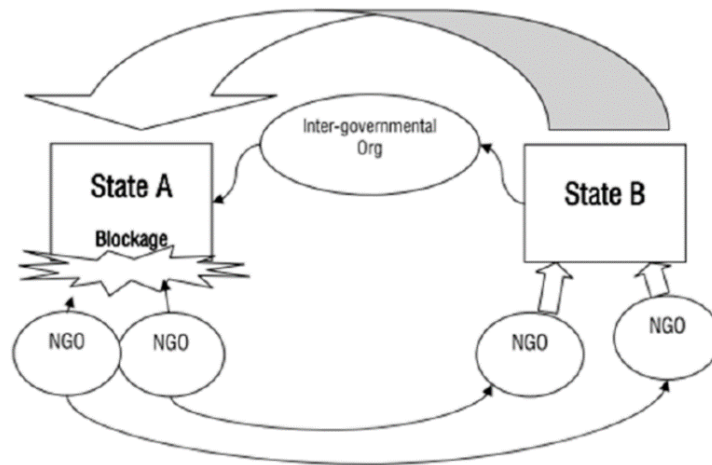


Diagram 1. Boomerang Pattern

Sumber: Keck & Sikkink, Activists Beyond Border: Advocacy Networks in International Politics

(1998), hal. 13

Pola atau model interaksi aktor yang terjadi dalam konsep *Transnational Advocacy Networks* adalah *Boomerang Pattern*. *Boomerang Pattern* merupakan pola atau model interaksi antar aktor dalam *Transnational Advocacy Networks* sebagai akibat dari terhambatnya jalur aspirasi dari aktor-aktor dalam suatu negara kepada pihak pemerintahnya itu sendiri. Ketika salah satu jalur menuju suatu negara yang akan dilalui oleh aktor NGO terhalangi, maka muncul suatu pola bumerang yang menunjukkan karakteristik jejaring transnasional. NGO lokal akan mencari aliansi dengan skala internasional untuk memperoleh dukungan yang lebih sebagai *bargaining power* dan menuntun pihak yang membantunya untuk memberikan tekanan lebih dari luar terhadap negara yang memblokade tersebut.

Tekanan dari luar tersebut bisa saja dari aktor non-negara maupun dari negara lain yang telah melaksanakan apa yang telah dituntut oleh NGO tersebut. Ataupun diinterpretasikan oleh organisasi ketiga seperti *inter-governmental organizations*. Dengan demikian, tekanan yang dihasilkan oleh pola hubungan semacam itu akan semakin mendapatkan perhatian dari pemerintah negara yang sebelumnya. Jejaring transnasional telah memperkuat tuntutan dari kelompok-kelompok lokal, membuka arena terbuka terhadap isu yang diusung, dan pada akhirnya membawa tuntutan tersebut kembali ke tingkat domestik. Pada akhirnya ditemukan

langkah-langkah alternatif yang dipilih diantaranya dengan membangun jaringan bersama aktor-aktor internasional dalam mencari dukungan dan memperjuangkan isu yang diusungnya serta mempengaruhi pemerintahan di negaranya melalui pihak luar.

Dalam praktiknya, Keck dan Sikkink membagi strategi yang dapat digunakan *Transnational Advocacy Networks* ke dalam empat macam, yaitu;

- a. *Information Politics*, yaitu kemampuan untuk secara cepat dan tepat dalam mengembangkan informasi yang secara politis berguna dan menghasilkan pengaruh yang besar. Kemampuan tersebut berupaya untuk mempengaruhi perkembangan komunikasi global. Dengan demikian, strategi media menjadi salah satu hal yang dimanfaatkan oleh aktor-aktor domestik. Keberadaan media mampu menjadi agen perubahan yang memfasilitasi mobilisasi politik berdasarkan isu-isu yang diperjuangkan.
- b. *Symbolic Politics*, yaitu kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol, tindakan-tindakan atau cerita dan kisah yang mampu menggambarkan dan mewakili isu yang dibawa kepada masyarakat luas.
- c. *Leverage Politics*, yaitu upaya mengumpulkan para aktor yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat luas sehingga mampu memperkuat pergerakan yang dilakukan oleh anggota jaringan tersebut. Cara untuk memperkuat pergerakannya adalah dengan mengumpulkan para aktor yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat luas.
- d. *Accountability Politics*, yaitu peran komunitas ataupun anggota dari jaringan dalam menjaga dan mengawasi pemerintah untuk tetap mempertahankan kebijakan-kebijakan yang telah sesuai dengan tujuan mereka. Upaya tersebut juga dapat mengoptimalkan advokasi yang ingin diperjuangkan.

Semua strategi yang terdapat pada TAN's milik Keck dan Sikkink dapat diterapkan sebagai strategi dari kolaborasi Migrant Care dan Australia dalam mendorong advokasi buruh migran di Indonesia. Adapun penerapan konsep TAN's dalam strategi advokasi Migrant Care dan Australia dalam mengadvokasi buruh migran di Indonesia melalui program MAMPU adalah sebagai berikut :

Dalam strategi Information Politics, strategi penggunaan media yang diterapkan oleh Migrant Care bertujuan untuk mempublikasikan program MAMPU yang berkolaborasi dengan Australia. Publikasi dilakukan melalui media daring milik Migrant Care dan MAMPU yang dapat diakses oleh siapapun. Selain menggunakan media daring, pemberitaan mengenai aktivitas ini juga turut dimuat dalam surat kabar. Hal ini digunakan untuk memperluas cakupan untuk mempengaruhi komunitas masyarakat yang lebih luas. Terlebih dalam pelaksanaannya, Migrant Care selalu merilis hasil laporan aktivitasnya kepada masyarakat umum. Hasil laporan tersebut dapat diunduh secara gratis dalam laman daring resmi Migrant Care dalam hal program mitra MAMPU.

Dalam strategi Symbolic Politics, Migrant Care melakukan kolaborasi bersama Australia melalui program mitra MAMPU dengan mengadakan aktivitas bersama baik berupa serial *talkshow*, konferensi nasional, workshop, dan lainnya yang menonjolkan perlindungan terhadap pekerja migran perempuan dari eksploitasi dan diskriminasi. Selain itu, dalam beberapa aktivitasnya, Program MAMPU juga turut mengangkat isu-isu kontemporer dengan berbagai tagar melalui sosial media dan publikasinya. Hal ini menjadi sebuah pola yang dapat meyakinkan masyarakat luas akan terbentuknya persamaan ideologi dan tindakan yang berkala.

Dalam strategi Leverage Politics, Migrant Care dan Australia melibatkan aktor-aktor lainnya demi melancarkan program mitra MAMPU yaitu dengan bekerjasama melalui sektor pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta komunitas masyarakat lokal. Dengan latarbelakang Program MAMPU yang dikelola oleh NGO's bernama CowaterSogema

International sebagai representasi pemerintah Australia membuat jaringan antar NGO semakin luas. Beberapa pihak yang turut terlibat sebagai mitra MAMPU diantaranya adalah ‘Aisyiyah, Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), Yayasan Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA), Institut KAPAL Perempuan, KOMNAS Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), LBH APIK Aceh, LRC KJHAM, SAPA Institute Bandung, dan sebagainya. Kuatnya jaringan yang terbangun oleh Program MAMPU dapat dimanfaatkan oleh Migrant Care dalam bermitra sebagai upaya advokasi yang lebih kuat.

Dalam strategi Accountability Politics, Migrant Care dan Australia bekerja dengan cara mengawasi Pemerintah Indonesia dalam hal advokasi buruh migran di Indonesia. Selain itu, Program MAMPU juga berupaya mengangkat kepemimpinan perempuan di sektor publik dengan terus melibatkan banyak aktor perempuan dalam aktivitasnya. Program MAMPU selalu mengkaji dan memberi kritik terhadap pemerintah Indonesia dalam isu permasalahan migran dan pemberdayaan perempuan dalam dinamika masyarakat Indonesia.

D. Argumen Penelitian

Riset ini akan menerapkan dua strategi dari model Transnational Advocacy Networks (TAN’s) menurut Keck dan Sikkink. Pertama, Migrant Care dapat melakukan mobilisasi politik untuk mengadvokasi buruh migran yang termarginalkan dengan proses *information politics* melalui peran media sosial. Distribusi informasi yang terjadi akan mempengaruhi proses komunikasi global secara cepat dan memicu kesadaran lebih terhadap isu buruh migran yang termarginalkan. Kedua, permasalahan isu buruh migran yang mengalami kekerasan dan pelecehan terutama perempuan di Indonesia menjadi bagian dari proses *symbolic politics* bagi Migrant Care melalui program MAMPU dengan penggunaan tagar #PerempuanMampu sebagai simbol perjuangan perempuan. Hal ini bisa membangun persamaan pola pikir masyarakat akan pentingnya peran perempuan dalam dinamika masyarakat.

E. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa studi pustaka untuk menguatkan penelitian dalam bidang keilmuan. Studi pustaka merupakan bagian dari penelitian kualitatif dengan melakukan penelitian melalui teknik pengumpulan data dan informasi melalui buku rujukan, jurnal ilmiah, artikel daring serta sumber-sumber literatur lainnya yang dapat dipercaya. Penelitian ini juga akan menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian yang dilakukan menampilkan hasil temuan tanpa proses manipulasi atau tindakan lainnya. Penelitian ini akan menyajikan gambaran secara lengkap dengan mengeksplorasi data studi pustaka dan mengklarifikasi suatu fenomena atau isu dengan sejumlah variabel.

F. Jangkauan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan membatasi topik pada program Mitra MAMPU yang dijalankan oleh Migrant CARE sebagai bentuk kolaborasi dengan Pemerintah Australia dan menggunakan buruh migran yang berasal dari Indonesia sebagai obyek penelitiannya. Penelitian ini juga akan dibatasi oleh waktu yaitu selama periode 2012-2019.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi penulisan yang terdiri dari :

- Bab I Penulis akan menjelaskan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Penulis akan menjelaskan mengenai peran Migrant CARE dan Australia dalam aktivitas advokasi buruh migran.

- Bab III Penulis akan menjelaskan mengenai analisis dari hasil kolaborasi program MAMPU antara Migrant CARE dan Australia di Indonesia.
- Bab IV Kesimpulan.